



Birokratisasi Islam di Indonesia, Brunei, dan Malaysia: Systematic Literature Review (SLR)

Ulul Azmi^{1,*}, Muhammad Fikri², Muhammad Affandi Yusuf³, Munawir Khaliq⁴
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri (UIN)
Mataram, Jln. Gajaj Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram, 8331
Email Korespondensi: Azistia42@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan kajian akademik mengenai birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis bibliometrik. Meskipun ketiga negara berada dalam konteks sosial dan tradisi keislaman yang serupa, literatur menunjukkan bahwa birokratisasi Islam berkembang melalui model yang berbeda: pluralistik-kompetitif (Indonesia), legal-birokratik terpusat (Malaysia), dan monarki-sentralistik (Brunei). Dengan menggunakan kerangka PRISMA, penelitian ini menyeleksi 20 artikel terindeks Scopus yang relevan hingga November 2025 dan menganalisisnya melalui analasi basis data scopus dan perangkat VOSviewer untuk memetakan tren publikasi, jaringan kolaborasi, kata kunci dominan, serta struktur intelektual penelitian. Hasil temuan literatur birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama di Asia Tenggara berkembang melalui tiga model berbeda: pluralistik-kompetitif di Indonesia, legal-birokratik terpusat di Malaysia, dan monarki-sentralistik di Brunei. Penelitian ini memberikan kontribusi melalui pemetaan konseptual yang komprehensif, identifikasi research gap, serta rekomendasi arah riset masa depan, termasuk pentingnya kajian tentang digitalisasi layanan keagamaan, dampak terhadap minoritas, serta hubungan antara birokrasi agama dan masyarakat sipil.

Kata kunci: Birokratisasi, Islam, Indonesia, Malaysia, Brunei, SLR

The Bureaucratization of Islam in Indonesia, Malaysia, and Brunei: A Systematic Literature Review (SLR)

Abstract

This study analyzes the development of academic research on the bureaucratization of Islam in Indonesia, Malaysia, and Brunei using a Systematic Literature Review (SLR) combined with bibliometric analysis. Although the three countries share similar socio-religious contexts and Islamic traditions, the literature shows that the bureaucratization of Islam has evolved into distinct models: pluralistic-competitive in Indonesia, centralized legal-bureaucratic in Malaysia, and monarchical-centralistic in Brunei. Using the PRISMA framework, this study selected 20 relevant Scopus-indexed articles published up to November 2025 and examined them through Scopus-based analysis and VOSviewer to map publication trends, collaboration networks, dominant keywords, and the intellectual structure of the field. The findings demonstrate that state-religion relations in Southeast Asia develop across three different bureaucratic models: a pluralistic-competitive regime in Indonesia, a centralized legal-bureaucratic regime in Malaysia, and a monarchical-centralistic regime in Brunei. This study contributes to the literature by providing a comprehensive conceptual mapping, identifying key research gaps, and proposing future research directions, including the need to explore digitalization of religious services, impacts on minority communities, and the evolving relationship between religious bureaucracy and civil society.

Keywords: Bureaucratization; Islam; Indonesia; Malaysia; Brunei; Systematic Literature Review (SLR).

How to Cite: Birokratisasi Islam di Indonesia, Brunei, dan Malaysia: Systematic Literature Review (SLR) . (2025). *Empiricism Journal*, 6(4), 1871-1883. <https://doi.org/10.36312/7nrbz568>



<https://doi.org/10.36312/7nrbz568>

Copyright© 2025, Azmi et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Kodifikasi dan birokratisasi hukum Islam di Asia Tenggara telah menjadi salah satu tema penting dalam kajian hubungan agama-negara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ketiga negara ini menunjukkan pola historis yang serupa—yakni integrasi hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional, namun dengan varian institusional dan pendekatan yang berbeda. Literatur menunjukkan bahwa proses birokratisasi Islam merupakan bagian dari perkembangan hukum modern yang dipengaruhi oleh interaksi

antara norma agama, hukum adat, dan warisan administrasi kolonial (Hooker, 1978). Integrasi ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan identitas politik dan legitimasi keagamaan di era negara-bangsa modern (Müller & Steiner, 2018).

Meskipun kajian tentang birokratisasi Islam cukup berkembang, penelitian sebelumnya masih tersebar dalam berbagai disiplin seperti antropologi, hukum, politik, dan studi kawasan, sehingga belum tersedia sintesis komprehensif yang memetakan pola umum, perkembangan historis, dan kecenderungan ilmiah mengenai tema ini. Selain itu, belum ada telaah menyeluruh yang membandingkan bagaimana birokratisasi Islam dibahas dalam literatur akademik lintas negara di Asia Tenggara. Ketidakteraturan publikasi, keragaman sudut pandang, dan variasi metodologi menjadi alasan penting perlunya sistematisasi pengetahuan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR).

Metode SLR memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur secara terstruktur dan transparan. Pendekatan ini tidak hanya menyajikan ringkasan tematik, tetapi juga memetakan tren penelitian, sumber dominan, pola publikasi, afiliasi penulis, serta celah penelitian yang belum terisi. Dengan demikian, SLR menjadi alat untuk memahami perkembangan intelektual birokratisasi Islam, bukan sebagai deskripsi empiris negara, melainkan sebagai objek kajian akademik yang berkembang lintas disiplin dan lintas waktu. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis bagaimana birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei dikonstruksi dalam literatur akademik, apa pola tematik utama yang muncul, bagaimana distribusi publikasinya, dan sejauh mana kajian tersebut merefleksikan transformasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Melalui pendekatan ini, tulisan ini memberikan kontribusi berupa pemetaan konseptual dan bibliometrik atas penelitian birokratisasi Islam di Asia Tenggara serta membuka ruang bagi pengembangan agenda riset yang lebih terarah pada masa mendatang.

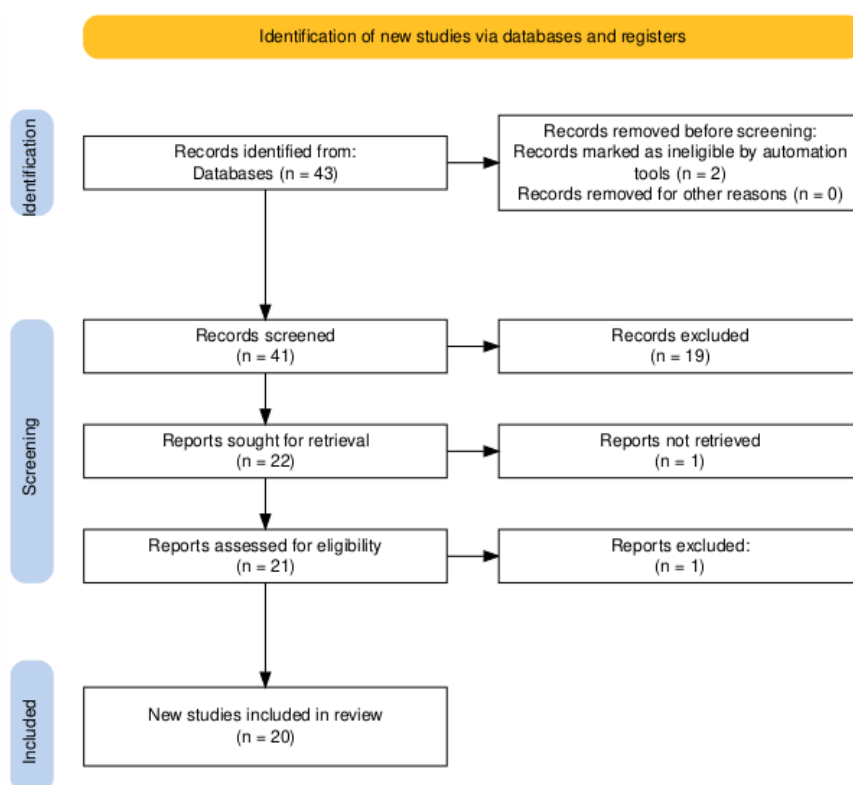
Sebagai upaya untuk memahami dinamika keberagaman dan hubungan negara-agama di Asia Tenggara, kajian mengenai birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei menjadi semakin relevan untuk ditelaah kembali. Ketiga negara tersebut memperlihatkan pola yang berbeda dalam membangun otoritas keagamaan, mengatur institusi Islam, dan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam struktur administrasi negara. Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang secara sistematis memetakan perkembangan wacana tersebut, baik dari segi relevansi akademiknya maupun pola penyebaran kajian dalam literatur ilmiah internasional. Lebih jauh, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konfigurasi birokratisasi Islam tersebut memberikan dampak teoretis maupun praktis terhadap perkembangan studi Islam dan tata kelola keagamaan di kawasan ini. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: *pertama*, sejauh mana penelitian tentang birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei menunjukkan relevansi, urgensi, serta perkembangan wacana keilmuan dalam kajian akademik kontemporer; dan *kedua*, bagaimana distribusi, pola penelitian, dan jejaring ilmiah terkait birokratisasi Islam di ketiga negara tersebut, serta apa implikasi teoretis dan praktis dari temuan tersebut bagi arah penelitian di masa depan. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis bibliometrik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan riset birokratisasi Islam, sekaligus menawarkan pijakan ilmiah bagi pengembangan studi-studi selanjutnya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review yang menggabungkan pendekatan bibliometrik tidak hanya menilai literatur secara kuantitatif tetapi juga untuk menggambarkan secara lebih komprehensif terkait dengan tren penelitian, pola pengembangan topik serta mengidentifikasi penulis, jurnal maupun institusi yang berperan penting dalam suatu disiplin ilmu (Firmansyah et al., 2023; Ranjan Sethi & Mahadik, 2024). Penelitian ini menggunakan kerangka analisis PRISMA, PRISMA adalah pedoman yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan dalam tinjauan sistematis dan meta analisis (Beller et al., 2013). Kerangka analisis PRISMA terdiri dari beberapa elemen kunci yang membantu peneliti dalam menyusun dan melaporkan hasil penelitian mereka secara sistematis (Page et al., 2021). Menggunakan kerangka analisis

PRISMA dalam penelitian ini memastikan penelitian terstruktur dalam melakukan metode SLR sehingga dapat memastikan cakupan literatur yang komprehensif dan penyeleksian data yang ketat. Proses tinjauan pustaka kajian proses dalam metode *Systematic Literature Review* (SLR) dilakukan secara metodis, transparan, dan replikasif sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang perkembangan bidang terkini .Dalam metode *Systematic Literature Riview* (SLR) dilakukan secara metodis, transparan, dan replikasif sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang perkembangan bidang terkini (Donthu et al., 2021). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini mencakup, pertama artikel yang terbit sampai dengan november 2025, 2. Penulisan artikel dalam bahasa inggris, 3. Berfokus pada topik birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Selanjutnya, perangkat lunak VOSviewer digunakan untuk melakukan analisis bibliometrik, Ini digunakan untuk memvisualisasikan data bibliografis yang mencakup kolaborasi antar penulis, jaringan sitasi, dan keterkaitan kata kunci. Ini memungkinkan untuk menunjukkan struktur intelektual dan dinamika kajian. Kombinasi analisis bibliometrik dan *Systematic Literature Review* (SLR)memungkinkan peneliti tidak hanya mensintesis hasil empiris tetapi juga menggambarkan lingkungan penelitian, termasuk menemukan tren dan arah kemajuan (Nageye et al., 2024). Basis utama data dalam penelitian adalah artikel yang diperoleh melalui database Scopus dengan menggunakan kata kunci "Bureaucrat* AND Islam AND ("Southeast Asia" OR Indonesia OR Malaysia OR Brunei)". Pemilihan kata kunci, yang dilakukan melalui metodologi makro (top-down) dan dimulai dengan jalur pencarian yang langsung lebih spesifik, merupakan tahap awal dari penelitian akademik ini. Dengan pencarian yang lebih spesifik langsung pada kata kunci "Bureaucrat* AND Islam AND (Indonesia OR Malaysia OR Brunei)" memudahkan peneliti untuk memilih artikel yang relevan terkait dengan penelitian yaitu birokratisasi islam di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Berikut adalah skema kerangka PRISMA proses pencarian artikel sampai dengan hasil akhir yang termasuk dalam proses Literatur Review (Haddaway et al., 2022).



Skema 1. *Systematic Literatur Riview* (SLR) kerangka analisis PRISMA.

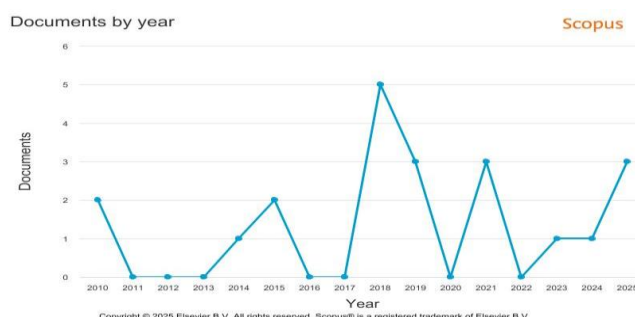
Berdasarkan hasil pencarian pada 16 November 2025 melalui basis data Scopus dengan menggunakan judul, arikel dan abstrak serta kata kunci "Bureaucrat* AND Islam AND ("Southeast Asia" OR Indonesia OR Malaysia OR Brunei)" ditemukan publikasi yang terbit sejak 2010 sampai dengan 2025 berjumlah 43 dokumen. Kemudian pencarian

dilakukan dengan kata kunci lebih spesifik “Bureaucrat* AND Islam AND (Indonesia OR Malaysia OR Brunei)” menghasilkan 41 dokumen yang relevan. Dari 41 dokumen penulis melakukan penyaringan manual dari scopus yaitu berdasarkan jenis dokumen, beberapa dokumen tidak disertakan berjumlah 19 dokumen antara lain bab buku (7) makalah konferensi (4) buku (2) dan tinjauan (1). Selain berdasarkan jenis dokumen penulis juga menyaring berdasarkan bahasa, yang tidak termasuk dokumen bahasa inggris (1), sehingga mengerecut menjadi 21 dokumen. Setelah proses tersebut kemudian discrening lagi untuk menentukan relevansi antara judul penelitian dengan artikel, yang dikecualikan 1 dokumen tidak memiliki relevansi karena tidak membahas tentang birokratisasi islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei darussalam. Hasil akhir dari dokumen berjumlah 20 untuk direview dan di analisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Hasil pencarian database dari scopus tersebut kemudian dianalisis menggunakan perangkat Vosviewer untuk menampilkan data bibliometrik yang sudah diekstraksi. Analisis bibliometrik dilakukan untuk mengidentifikasi pola umum penelitian mengenai birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dengan menggunakan VOSviewer, beberapa elemen bibliometrik dianalisis, meliputi co-authorship, co-occurrence of keywords, citation networks, serta publication trends. Secara keseluruhan, hasil bibliometrik melalui VOSviewer memberikan gambaran komprehensif mengenai arah dan fokus penelitian birokratisasi Islam di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sekaligus menunjukkan celah penelitian yang dapat dikembangkan dalam studi-studi berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil awal dari proses SLR terhadap artikel-artikel dalam basis data Scopus dengan kata kunci “Bureaucrat AND Islam AND (Indonesia OR Malaysia OR Brunei)” mengidentifikasi sejumlah publikasi yang relevan dengan tema birokratisasi Islam di kawasan tersebut. Artikel-artikel ini menunjukkan variasi fokus kajian, mulai dari dinamika hubungan negara dan lembaga keagamaan, pola regulasi terhadap praktik keagamaan, hingga perbandingan model tata kelola Islam oleh otoritas negara di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dataset ini kemudian dianalisis untuk melihat perkembangan publikasi per tahun, jenis jurnal, kontribusi negara, afiliasi institusi, serta kecenderungan tema penelitian. Berdasarkan peta literatur tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah kajian dengan menganalisis secara sistematis bagaimana birokratisasi Islam dipahami, dipraktikkan, dan dikembangkan dalam tiga negara yang memiliki latar sosial-politik berbeda namun sama-sama menempatkan Islam sebagai elemen penting dalam tata kelola publik. Oleh karena itu, diskusi ini dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memetakan hasil data yang diperoleh, antara lain sebagai berikut: Berdasarkan data dari scopus menunjukkan bahwa sejak 2010 sampai 2025 terdapat 20 artikel yang relevan yang membahas tentang birokratisasi Islam di ketiga negara Muslim di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei. Jumlah ini memberikan gambaran keterbatasan pembahasan mengenai isu-isu birokratisasi Islam di negara-negara tersebut padahal, sejauh ini terdapat banyak sekali dinamika perkembangan di ketiga negara tersebut dalam mengkonsepkan Islam sebagai upaya untuk menjawab tantangan yang ada.



Gambar 1. *Number of Bureaucracy Research based on topic Indonesia, Malaysia, Brunei Publication.*

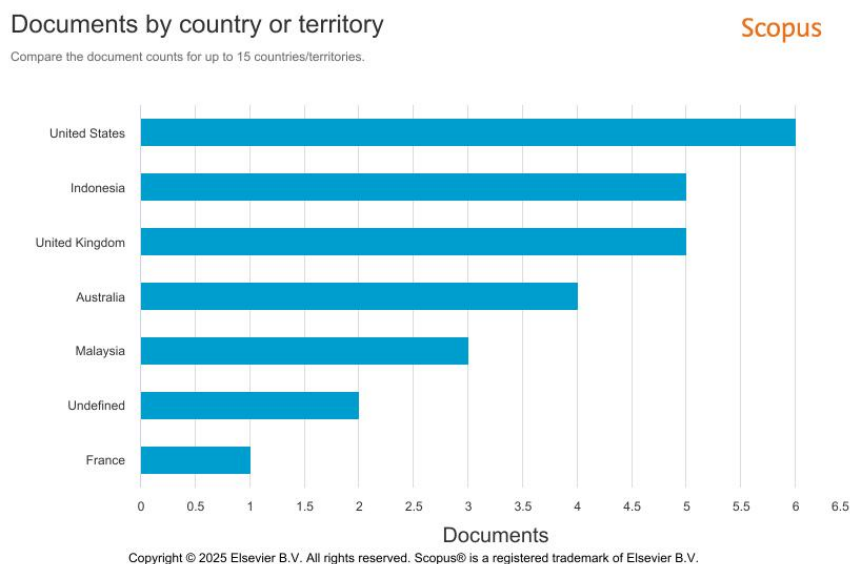
Perkembangan publikasi akademik yang berkaitan dengan topik penelitian ini menunjukkan pola yang fluktuatif namun memberikan gambaran penting mengenai dinamika perkembangan kajian. Pada periode awal tahun 2010 hingga 2014, jumlah dokumen yang teridentifikasi masih sangat rendah. Publikasi hanya muncul pada tahun 2010 (2 dokumen) dan 2014 (1 dokumen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam periode tersebut, isu yang menjadi fokus penelitian baik menyangkut Islam, birokrasi, maupun relasinya dengan perkembangan teknologi dan kebijakan pada negara ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Brunei, tidak terlalu diperhatikan untuk dikaji, sedangkan kajian mengenai birokratisasi pada ketiga negara ini sangat menarik, karena ketiga negara ini berada di kawasan geografis yang sama, mazhab yang sama dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam namun berbeda dalam pendekatannya terhadap Islam.

Memasuki tahun 2015 hingga 2018, tren publikasi menunjukkan perubahan cukup signifikan. Tahun 2014-2015 mencatat 2 dokumen (Peletz, 2015; Samuri & Quraishi, 2014) yang sesuai dengan kriteria, kemudian menurun pada 2016–2017 di mana tidak ditemukan publikasi, namun meningkat drastis pada tahun 2018 dengan total 5 dokumen (Abdul Hamid, 2018; Fogg, 2018; Müller, n.d.; Sloane-White, 2018; Steiner, 2018). Tahun 2018 menjadi puncak produktivitas, lonjakan ini juga menggambarkan bahwa kajian tersebut telah mulai menarik perhatian lebih luas dalam komunitas akademik global. Pada periode 2019 hingga 2025, jumlah publikasi menunjukkan pola naik-turun yang konsisten dengan karakter isu yang bersifat situasional. Tahun 2019 terdapat 3 dokumen (Jahar, 2019; Randhawa, 2019; Sullivan, 2019), diikuti penurunan pada tahun 2020 yang tidak menghasilkan publikasi. Namun, minat kembali meningkat pada 2021 dengan 3 dokumen (Kharlie & Triana, 2021; Mohd Razif, 2021; Wadipalapa, 2021), kemudian turun kembali pada tahun 2022 tanpa publikasi, tahun 2023-2024 masing-masing 1 dokumen (Millie et al., 2023; Ting & Kolawole, 2024) tetapi pada 2025 kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3 dokumen (Abdi, 2025; Muchtar et al., 2025; Senay et al., 2025). Dengan demikian Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun perhatian akademik terhadap topik penelitian tidak stabil, terdapat kecenderungan bahwa kajian mengenai Islam, birokratisasi, atau integrasinya semakin berkembang. Secara keseluruhan, dinamika publikasi ini memperlihatkan bahwa penelitian di bidang tersebut berkembang dalam pola episodik, yaitu naik ketika isu-isu tertentu muncul atau ketika konteks sosial-politik meningkatkan urgensinya. Fluktuasi ini juga menandakan adanya kesenjangan riset (*research gap*) yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, terutama terkait bagaimana konsep-konsep dalam Islam dibahas dalam kerangka birokrasi modern, tata kelola pemerintahan, atau integrasi teknologi baru seperti artificial intelligence. Dengan demikian, hasil SLR ini tidak hanya memetakan tren penelitian, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan kajian yang lebih mendalam dan sistematis sesuai dengan kebutuhan akademik kontemporer.

Setelah memetakan relevansi, urgensi serta dalam kajian ini, selanjutnya adalah memetakan seperti apa distribusi, pola penelitian, dan jejaring ilmiah terkait birokratisasi Islam di ketiga negara tersebut, serta apa implikasi teoretis dan praktis dari temuan tersebut bagi arah penelitian di masa depan. Berikut adalah distribusi penelitian berdasarkan database yang diperoleh dari scopus.

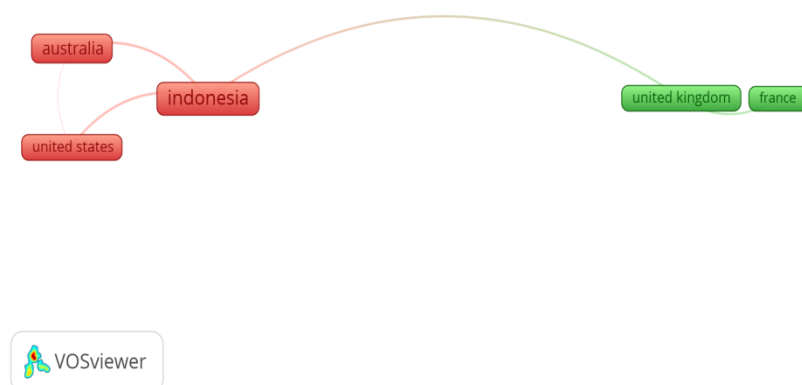
Pertama, ditinjau dari sebaran negara asal publikasi, pada bagian ini Hasil pemetaan publikasi berdasarkan negara menunjukkan bahwa kajian mengenai birokratisasi Islam tidak hanya diproduksi oleh negara-negara yang menjadi fokus utama penelitian—Indonesia, Brunei, dan Malaysia tetapi juga mendapat perhatian luas dari akademisi internasional. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah publikasi tertinggi (6 dokumen), diikuti Indonesia dan Inggris (masing-masing 5 dokumen). Australia berkontribusi dengan 4 dokumen, sementara Malaysia muncul dengan 3 dokumen. Terdapat juga publikasi dari negara yang tidak teridentifikasi (2 dokumen) dan Prancis (1 dokumen). Pola ini mengindikasikan hal penting birokratisasi Islam di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, Brunei, dan Malaysia menjadi isu yang menarik perhatian akademik global. Dominasi publikasi dari negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa fenomena birokratisasi Islam dipandang sebagai praktik yang unik dan layak dikaji dari perspektif politik, hukum, dan kebijakan publik negara-negara Muslim. Kontribusi Indonesia dan Malaysia dalam publikasi memperlihatkan bahwa dua negara ini merupakan episentrum kajian birokratisasi Islam di kawasan Asia Tenggara karena negara ini

merupakan negara muslim dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Sementara itu, minimnya publikasi yang secara eksplisit berasal dari Brunei mencerminkan adanya research gap yang sangat signifikan, mengingat Brunei memiliki sistem birokrasi Islam yang paling mapan secara formal namun kurang terdokumentasi dalam literatur internasional. Temuan ini menegaskan bahwa penelitian bibliometrik dan SLR yang Anda lakukan memiliki urgensi tinggi. Distribusi publikasi yang tidak merata memperlihatkan bahwa narasi tentang birokratisasi Islam lebih banyak dibentuk oleh studi terhadap Indonesia dan Malaysia, sementara Brunei masih berada di ruang yang kurang dieksplorasi. (Lihat gambar 2)



Gambar 2. *Number of articles by country of territory.*

Selain ditinjau dari sebaran publikasi berdasarkan negara, penting juga untuk memvisualisasikan kolaborasi ilmiah antar negara, berikut visualisasi kolaborasi ilmiah antara negara yang dianalisis menggunakan perangkat Vosviewer: (Lihat Gambar 3)

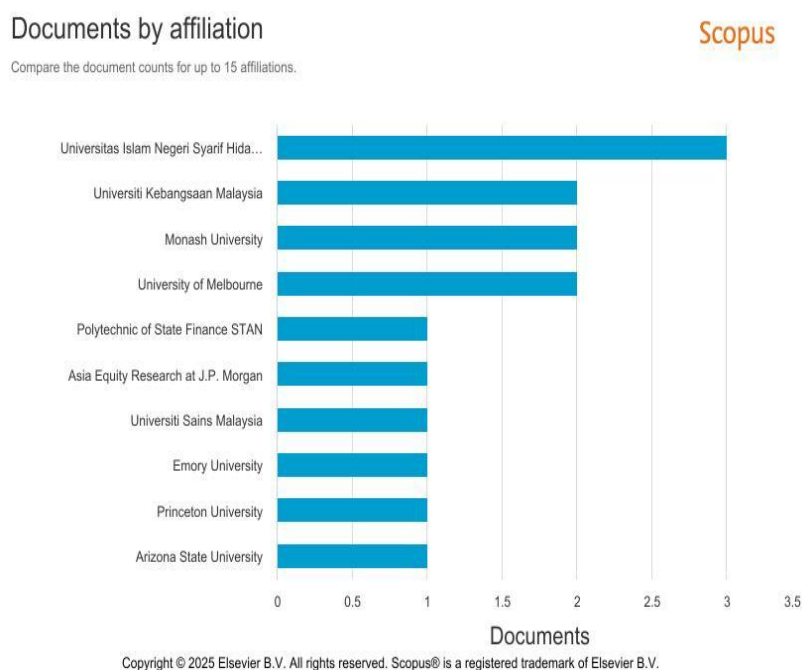


Gambar 3. *Network Country Visualization.*

Visualisasi jaringan kolaborasi negara menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi sentral dalam penelitian mengenai birokratisasi Islam di Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari keterhubungan Indonesia dengan Australia dan Amerika Serikat, yang mencerminkan tingginya ko-publikasi dan ketertarikan akademik internasional terhadap dinamika

birokratisasi Islam di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia dan Brunei tidak muncul dominan, yang mengindikasikan bahwa publikasi terkait kedua negara tersebut lebih terbatas atau kurang terintegrasi dalam jejaring kolaborasi global, walaupun dalam kajian ini Malaysia dan Brunei menjadi objek kajian peneliti dari luar negara tersebut. Di sisi lain, United Kingdom dan France membentuk klaster terpisah tanpa keterhubungan langsung dengan Indonesia, memperlihatkan fokus kajian yang berbeda dan minimnya kolaborasi dengan penelitian birokratisasi Islam di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, peta ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan pusat perhatian utama dalam diskursus internasional mengenai birokratisasi Islam, sementara Malaysia dan Brunei cenderung tampil dalam lingkup kajian yang lebih domestik dan kurang terhubung secara global.

Kedua, distribusi kontribusi ilmiah publikasi berdasarkan afiliasi menunjukkan bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan institusi dengan kontribusi terbesar dalam kajian terkait birokratisasi Islam, dengan jumlah dokumen paling tinggi. Dominasi UIN Jakarta ini mengindikasikan bahwa isu birokratisasi Islam paling banyak diteliti dari perspektif Indonesia, terutama oleh akademisi yang berkecimpung langsung dalam studi keislaman dan administrasi publik. Di posisi berikutnya, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Sains Malaysia (USM), serta beberapa universitas di Australia seperti Monash University dan University of Melbourne turut memberikan kontribusi signifikan. Kehadiran institusi-institusi Malaysia menunjukkan bahwa birokratisasi Islam juga menjadi topik penting dalam diskursus akademik Malaysia, meskipun jumlah kontribusinya masih berada di bawah Indonesia. Menariknya, beberapa institusi dari luar kawasan seperti Emory University, Princeton University, dan Arizona State University juga muncul dalam daftar, menunjukkan adanya minat akademik global terhadap proses birokratisasi Islam di Asia Tenggara. Keterlibatan universitas-universitas ini menandakan bahwa fenomena birokratisasi Islam dipandang relevan dalam kajian internasional mengenai agama, negara, dan governance. Sementara itu, tidak tampak afiliasi institusi dari Brunei dalam daftar ini. Hal ini mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa publikasi terkait birokratisasi Islam di Brunei masih sangat terbatas atau tidak terindeks secara luas, sehingga tidak muncul dalam jaringan afiliasi global. (Lihat gambar 4)

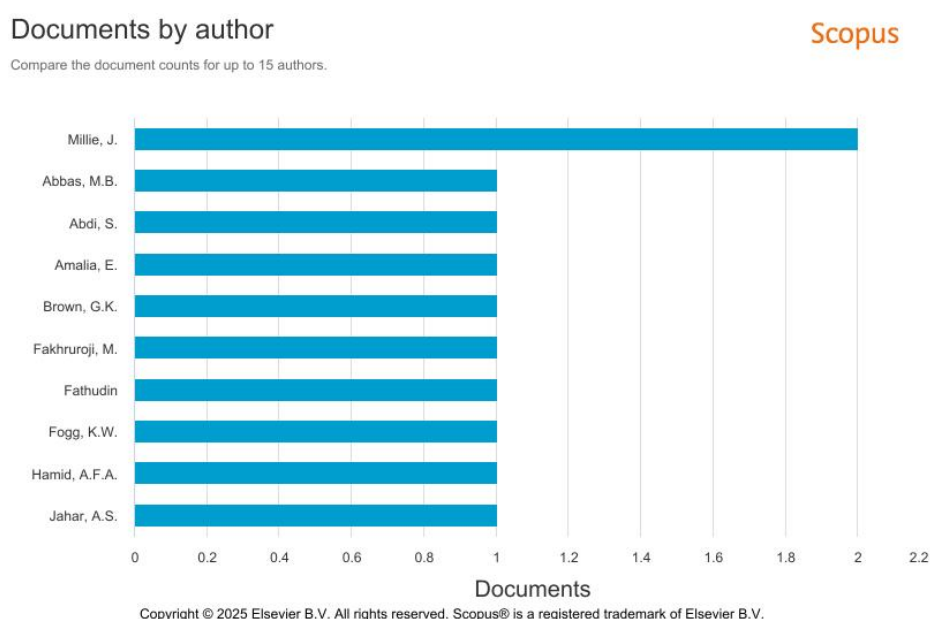


Gambar 4. Network by affiliation.

Publikasi mengenai birokratisasi Islam di Asia Tenggara masih menunjukkan pola yang sporadis dan belum stabil. Grafik Documents per Year by Source memperlihatkan bahwa artikel tentang topik ini terbit dalam jumlah yang kecil dan tersebar pada berbagai jurnal tanpa adanya sumber yang dominan. Puncak publikasi terjadi pada 2018 melalui

Journal of Current Southeast Asian Affairs dengan empat artikel, menandakan meningkatnya perhatian terhadap relasi negara dan Islam, terutama di Indonesia dan Malaysia. Pada tahun-tahun lainnya, publikasi muncul secara terpisah di jurnal seperti *American Ethnologist* (2015), *Asian Studies Review* (2021), dan *Bijdragen Tot De Taal Land En Volkenkunde* (2023), mencerminkan cakupan kajian yang interdisipliner meliputi antropologi, politik, dan sejarah. Pola ini menunjukkan bahwa birokratisasi Islam masih merupakan topik yang berkembang dan belum menjadi arus utama dalam literatur internasional, meskipun memiliki relevansi penting dalam studi Asia Tenggara.

Kajian mengenai birokratisasi Islam di Asia Tenggara merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, berdasarkan data bibliometrik Scopus yang tercermin dalam grafik Documents by Author, terlihat bahwa literatur akademik mengenai topik ini masih relatif terbatas dan tersebar di antara beberapa penulis kunci. Grafik tersebut menunjukkan bahwa hanya terdapat sekitar 10 penulis yang menghasilkan publikasi dalam topik terkait, dengan jumlah dokumen bervariasi antara 1 hingga 2 tulisan per penulis. Penulis dengan kontribusi terbesar adalah Millie, J. yang memiliki 2 dokumen, sementara penulis lain seperti Abbas, M.B., Abdi, S., Amalia, E., Brown, G.K., Fakhruroji, M., Fathudin, F., Fogg, K.W., Hamid, A.F.A., dan Jahar, A.S. masing-masing berkontribusi 1 dokumen. (Lihat gambar 5)



Gambar 5. *Count of publication by author (top 10 authors).*

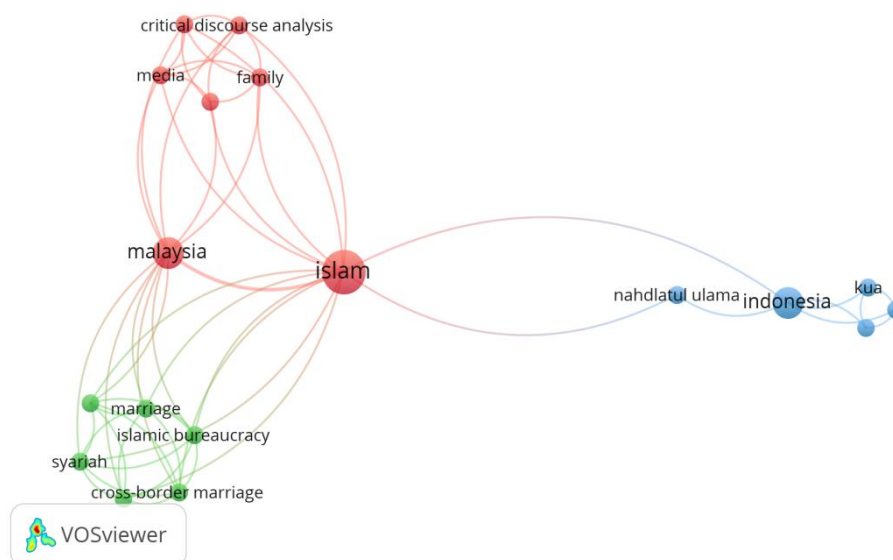
Kemudian apa implikasi teoritis dan praktis dari temuan data dari scopus yang telah dipaparkan terhadap kajian tentang birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia dan brunei. Visualisasi link strength menggambarkan intensitas hubungan antar-kata kunci dalam literatur mengenai birokratisasi Islam, dan menjadi indikator penting untuk membaca struktur pengetahuan dalam bidang ini. Pada grafik yang dihasilkan, terlihat bahwa beberapa istilah seperti Islamic bureaucracy, state Islam, Sharia governance, dan Islamic administration memiliki kekuatan hubungan (link strength) tertinggi, menandakan bahwa istilah-istilah ini paling sering muncul bersama dalam dokumen yang sama dan membentuk inti diskursus akademik. Kuatnya hubungan ini mengindikasikan bahwa penelitian mengenai birokratisasi Islam tidak berdiri secara terpisah, melainkan berada dalam satu klaster besar yang membahas peran negara dalam membentuk, mengatur, dan mentransformasikan otoritas keagamaan.

Selain itu, struktur link strength menunjukkan adanya pembentukan sub-klaster tematik. Sub-klaster pertama berkaitan dengan isu legal codification, Islamic courts, dan family law, yang secara dominan muncul dalam konteks Indonesia. Ini mencerminkan kecenderungan literatur untuk memaknai birokratisasi Islam sebagai proses kodifikasi dan standarisasi hukum melalui institusi seperti Kementerian Agama atau peradilan agama.

Sub-klaster kedua yang lebih kuat muncul pada konteks Malaysia berkaitan dengan state Islamic governance, fatwa institutions, dan religious centralization, menunjukkan hubungan erat antara birokrasi keagamaan dan struktur federal yang terpusat. Adapun sub-klaster Brunei berfokus pada Islamic monarchy, state fatwa, dan Sharia enforcement, yang mencerminkan karakter negara yang sangat terpusat dalam otoritas keagamaan.

Dominasi warna dan ketebalan garis pada grafik link strength menunjukkan bahwa hubungan antar-kata kunci tersebut bukan sekadar ko-eksistensi, tetapi membentuk jaringan konseptual yang menyiratkan bahwa birokratisasi Islam dipahami melalui kombinasi tiga proses: institusionalisasi, regulasi, dan legitimasi. Ketiganya membentuk pola yang saling terikat dalam sebagian besar karya ilmiah yang dianalisis. Visualisasi ini menegaskan bahwa penelitian di kawasan Asia Tenggara berfokus pada bagaimana negara-negara modern mengkonsolidasikan kewenangan keagamaan melalui perangkat administratif, hukum, dan kebijakan.

Dengan demikian, link strength memberikan gambaran bahwa hubungan antar konsep dalam kajian birokratisasi Islam bersifat padat, terfokus, dan menunjukkan arah kajian yang semakin mengonsolidasikan peran negara dalam praktik keberagamaan. Data ini memperkuat argumen bahwa birokratisasi Islam merupakan proses multidimensional yang melibatkan interaksi erat antara hukum, institusi negara, dan konstruksi otoritas keagamaan. Temuan ini juga memberi landasan untuk melakukan perbandingan konseptual antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei, karena masing-masing negara menunjukkan pola hubungan yang berbeda dalam jaringan konsep, mencerminkan perbedaan historis dan politik dalam proyek birokratisasi Islam.

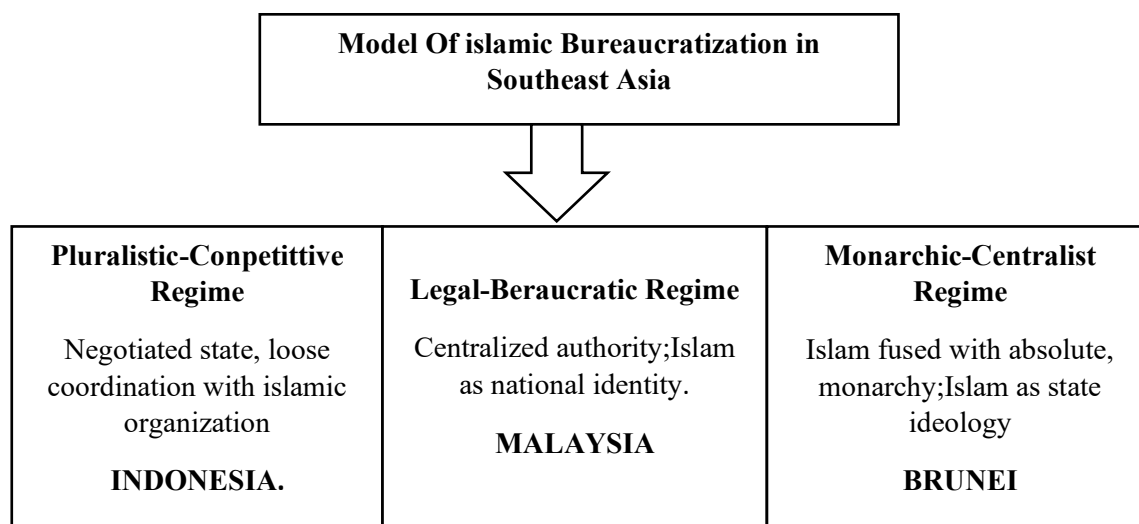


Gambar 7. Co-occurrence framework and representation of key terms

Data bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei tidak hanya kaya secara konseptual, tetapi juga memiliki pola produksi ilmiah yang membentuk arah pemahaman akademik di kawasan ini. Analisis link strength memperlihatkan bahwa kajian mengenai birokrasi Islam paling banyak terhubung dengan tema-tema state-led Islam, politik identitas, kelembagaan Syariah, dan hubungan negara-agama. keterhubungan yang kuat dalam jaringan literatur, menandakan bahwa kerangka teoretis yang dominan dalam riset-riset ini adalah hubungan antara otoritas negara, ortodoksi keagamaan, dan proses modernisasi birokrasi Islam. Tingginya total link strength pada kategori “Islamic bureaucracy”, “Sharia governance”, “state control”, dan “religious administration” memperkuat temuan SLR bahwa birokratisasi Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai Islamisasi, melainkan proses pengaturan agama oleh negara yang sangat bergantung pada struktur politik dan sejarah kolonial masing-masing negara. Birokratisasi

Agama Merujuk pada proses di mana agama diatur dan dikelola melalui struktur birokrasi negara. Hal ini melibatkan pengaturan formal, ekspansi, dan diversifikasi institusi serta kerangka hukum agama oleh negara (Müller, 2018a). Proses ini sering kali mencakup transformasi tokoh keagamaan lokal menjadi pegawai negara dan intervensi administratif serta ideologis ke dalam ruang keagamaan (Gasimov, 2020).

Dalam konteks Indonesia, menunjukkan dominasi artikel yang membahas peran Kementerian Agama, dinamika peradilan agama, serta interaksi antara negara dan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Jaringan sitasi yang padat pada tema Islamic courts, religious regulations, dan fatwa governance menegaskan bahwa birokratisasi Islam di Indonesia bergerak melalui kanal hukum dan pendidikan agama yang berlapis, sehingga memperkuat pandangan bahwa model Indonesia bersifat pluralistik tetapi tetap berorientasi pada penguatan moral negara (Alfitri, 2018; Jahar, 2019). Sementara itu, studi-studi tentang Malaysia sangat didominasi oleh publikasi yang berkaitan dengan state Islamization, legal centralization, serta pengaruh partai politik Islam dalam membentuk wacana keagamaan. Tingginya link strength pada topik ini mengindikasikan konsensus akademik bahwa Malaysia memiliki model birokratisasi agama yang paling terpusat dan paling politis di antara ketiga negara (Hosen & Shukri, 2024; Ufen, 2009)³⁴. Adapun Brunei, meskipun jumlah publikasinya lebih sedikit, menunjukkan jaringan sitasi yang kuat pada tema Melayu Islam Beraja (MIB), Sharia implementation, dan state orthodoxy, menandakan bahwa kajian akademik menempatkan Brunei sebagai model paling monarkis dan paling konsisten dalam memproduksi ortodoksi agama melalui birokrasi negara (Müller, 2018b, 2018a) berikut adalah bentuk birokratisasi. Bentuk birokratisasi islam pada masing-masing negara tidak terlepas dari konstitusi negara tersebut, Indonesia tidak secara resmi menetapkan Islam sebagai agama negara hal berbeda dengan Malaysia dan brunei yang secara resmi menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Dengan demikian kita bisa melihat pola birokratisasi agama berdasarkan literatur yang ditemukan pada ketiga negara tersebut adalah sebagai berikut:



Skema 2. *Model Of islamic Bureaucratization in Southeast Asia*

Secara keseluruhan, visualisasi link strength memperkuat pemetaan teoretis bahwa birokratisasi Islam di Asia Tenggara terbagi ke dalam tiga model utama: pluralistik-kompetitif (Indonesia), legal-birokratik (Malaysia), dan monarki-sentralistik (Brunei). Ketiganya sama-sama menunjukkan hubungan kuat antara negara dan lembaga Islam, namun berbeda dalam konfigurasi kontrol, distribusi otoritas keagamaan, dan ruang partisipasi masyarakat. Data ini tidak hanya memperjelas diferensiasi antarnegara tetapi juga memberikan dasar empiris bagi kerangka komparatif tentang birokratisasi Islam sebagai varian dari state-led religious governance di Asia Tenggara. Secara teoritis, temuan SLR yang kemudian diperkaya dengan pola bibliometrik memperlihatkan munculnya paradigma baru dalam studi birokratisasi Islam di Asia Tenggara. Kombinasi dari temuan literatur dan data bibliometrik menunjukkan bahwa birokratisasi Islam di tiga negara ini tidak dapat dijelaskan oleh dikotomi “Islamisasi dari atas” versus “Islamisasi dari bawah”, karena keduanya bekerja

secara simultan dan saling memengaruhi. Pola co-occurrence pada kata kunci RIS seperti “governance”, “identity”, “law enforcement”, dan “orthodoxy” mengarah pada pemahaman bahwa negara tidak hanya mengatur agama, melainkan juga membentuk identitas keagamaan masyarakat melalui perangkat birokrasi. Temuan ini mendorong pembentukan kategori teoretis baru berupa bureaucratized moral governance, yakni model di mana negara memproduksi moralitas dan ortodoksi melalui instrumen administratif, hukum, dan pendidikan agama. Selain itu, tingginya keterhubungan antar-penulis lintas negara memperlihatkan bahwa teori-teori mengenai hubungan negara–agama di Asia Tenggara semakin konvergen dan membentuk epistemic community tersendiri. Ini memberikan dasar bagi pengembangan teori komparatif Asia Tenggara yang lebih matang mengenai birokratisasi agama.

Dari sisi praktis, integrasi temuan SLR memperlihatkan bahwa penelitian masa depan perlu diarahkan pada isu-isu yang masih kurang dieksplorasi. Pola publikasi menunjukkan bahwa topik tentang dampak birokrasi agama pada minoritas, digitalisasi layanan keagamaan, dan relasi antara aparat agama dan masyarakat sipil masih memiliki link strength rendah, menandakan kesenjangan riset yang signifikan. Padahal pada era ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi agama telah memengaruhi hubungan antaragama (Platzdasch & Saravanamuttu, 2014), menekan keragaman ekspresi keagamaan dan mengubah peran ormas di Indonesia. Dalam konteks kebijakan, data bibliometrik dan temuan literatur memberikan gambaran bahwa ketiga negara membutuhkan model tata kelola agama yang lebih akuntabel dan adaptif. Malaysia dan Brunei perlu mengatasi tantangan sentralisasi berlebihan, sementara Indonesia perlu menata ulang hubungan antara negara dan ormas agar tidak terjadi kompetisi legitimasi keagamaan. Kajian literatur juga menegaskan pentingnya merumuskan kebijakan perlindungan bagi kelompok minoritas, serta mekanisme partisipasi publik dalam produksi aturan agama yang selama ini sangat dikuasai oleh birokrasi formal. Integrasi analisis SLR dan bibliometrik memberi sinyal bahwa era mendatang memerlukan birokrasi agama yang lebih dialogis, fleksibel, dan peka terhadap dinamika global serta perkembangan digital.

Birokratisasi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama di Asia Tenggara berkembang melalui tiga model berbeda: pluralistik-kompetitif di Indonesia, legal-birokratik terpusat di Malaysia, dan monarki-sentralistik di Brunei. Ketiga model ini memperlihatkan bahwa proses institusionalisasi Islam tidak mengikuti pola tunggal, melainkan dipengaruhi sejarah politik, struktur negara, dan konfigurasi otoritas ulama. Analisis SLR dan pemetaan jaringan konsep menegaskan bahwa birokratisasi Islam di kawasan ini berakar pada pergeseran otoritas keagamaan ke dalam perangkat administratif negara serta pembentukan ortodoksi melalui kebijakan dan regulasi formal. Implikasi teoretis utama penelitian ini adalah perlunya memperluas konsep state-led Islam untuk mencakup konteks demokratis, semi-otoritarian, dan monarki absolut, sebagaimana ditunjukkan oleh ketiga kasus tersebut. Secara praktis, birokratisasi Islam mempengaruhi tata kelola keagamaan, hubungan negara–masyarakat Muslim, serta arah kebijakan publik di masing-masing negara. Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai digitalisasi layanan agama, kapasitas birokrasi dalam mengelola keragaman, serta dampak kebijakan syariah terhadap masyarakat sipil dan kelompok minoritas.

REKOMENDASI

Pemerintah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei disarankan memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi Islam, memperluas kolaborasi antara negara–ulama–masyarakat sipil, serta mengembangkan digitalisasi layanan keagamaan agar lebih efisien dan inklusif. Selain itu, setiap negara perlu memastikan bahwa regulasi syariah tidak mengurangi hak kelompok minoritas, serta mendorong penelitian lanjutan tentang dampak sosial birokratisasi Islam untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, S. (2025). Negotiating Islam, Democracy and Pluralism: Islamic Politics and the State in Post-Reform Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 101–130. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10078>

- Abdul Hamid, A. F. A. (2018). Shifting trends of Islamism and Islamist practices in Malaysia, 1957–2017. *Southeast Asian Studies*, 7(3), 363–390. https://doi.org/10.20495/seas.7.3_363
- Alfitri. (2018). Religion and constitutional practices in Indonesia: How far should the state intervene in the administration of Islam? In *Asian Journal of Comparative Law* (Vol. 13, Issue 2, pp. 389–413). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.20>
- Beller, E. M., Glasziou, P. P., Altman, D. G., Hopewell, S., Bastian, H., Chalmers, I., Gøtzsche, P. C., Lasserson, T., & Tovey, D. (2013). PRISMA for Abstracts: Reporting Systematic Reviews in Journal and Conference Abstracts. *PLoS Medicine*, 10(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001419>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Firmansyah, E. A., Masri, M., Anshari, M., & Besar, M. H. A. (2023). Factors Affecting Fintech Adoption: A Systematic Literature Review. *FinTech*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.3390/FINTECH2010002>
- Fogg, K. W. (2018). Reinforcing charisma in the bureaucratisation of Indonesian islamic organisations. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(1), 117–140. <https://doi.org/10.1177/186810341803700105>
- Gasimov, K. (2020). The Bureaucratization of Islam in Azerbaijan: State as the Principal Regulator and Interpreter of Religion. *Central Asian Affairs*, 7(1), 1–37. <https://doi.org/10.30965/22142290-0701001>
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Hooker, M. B. (1978). TOWARDS A LEGAL HISTORY OF SOUTHEAST ASIA. In *Source: Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* (Vol. 51, Issue 1). <https://about.jstor.org/terms>
- Hosen, M. K., & Shukri, S. F. B. (2024). Strategies for Implementing Islamic Governance: Insights from Malaysia (2010-2020). *Islamic Quarterly*, 68(4), 507–534. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105019390460&partnerID=40&md5=628a4fdfba452ca91096582660fed326>
- Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing sharia in modern Indonesia: The case of zakat, waqf and family law. *Studia Islamika*, 26(2), 207–245. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797>
- Kharlie, A. T., & Triana, W. (2021). REFORMING ISLAMIC MARRIAGE BUREAUCRACY IN INDONESIA Approaches and Impacts. *Al-Jami'ah*, 59(2), 255–286. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.255-286>
- Millie, J., Syarif, D., & Fakhruroji, M. (2023). The Discipline of Dakwah in Indonesia's State Education System. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 179(1), 38–60. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10047>
- Mohd Razif, N. H. (2021). Nikah Express: Malay Polygyny and Marriage-making at the Malaysian–Thai Border. *Asian Studies Review*, 45(4), 635–655. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1870931>
- Muchtar, M., Rodoni, A., Amalia, E., & Warninda, T. D. (2025). The impact of the Indonesia–OIC countries' free trade agreement on the halal food sector: CGE analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 16(2), 428–446. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0075>
- Müller, D. M. (n.d.). Paradoxical Normativities in Brunei Darussalam and Malaysia. *Source: Asian Survey*, 56(3), 415–441. <https://doi.org/10.2307/26364367>
- Müller, D. M. (2018a). BUREAUCRATIC ISLAM COMPARED: CLASSIFICATORY POWER and STATE-IFIED RELIGIOUS MEANING-MAKING in BRUNEI and SINGAPORE. *Journal of Law and Religion*, 33(2), 212–247. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.29>
- Müller, D. M. (2018b). Hybrid pathways to orthodoxy in Brunei darussalam: Bureaucratized exorcism, scientisation and the mainstreaming of deviant-declared practices. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(1), 141–183. <https://doi.org/10.1177/186810341803700106>

- Müller, D. M., & Steiner, K. (2018). The bureaucratisation of Islam in Southeast Asia: Transdisciplinary perspectives. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(1), 3–26. <https://doi.org/10.1177/186810341803700101>
- Nageye, A. Y., Jimale, A. D., Abdullahi, M. O., & Ahmed, Y. A. (2024). Emerging Trends in Data Science and Big Data Analytics: A Bibliometric Analysis. *SSRG International Journal of Electronics and Communication Engineering*, 11(5), 84–98. <https://doi.org/10.14445/23488549/IJECE-V11I5P109>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Peletz, M. G. (2015). A tale of two courts: Judicial transformation and the rise of a corporate Islamic governmentality in Malaysia. *American Ethnologist*, 42(1), 144–160. <https://doi.org/10.1111/amet.12122>
- Platzdasch, B., & Saravanamuttu, J. (2014). Religious diversity in Muslim-majority states in Southeast Asia: Areas of toleration and conflict. In *Religious Diversity in Muslim-Majority States in Southeast Asia: Areas of Toleration and Conflict*. Institute of Southeast Asian Studies. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84942800900&partnerID=40&md5=48d3a560ead6390bad198da861ee8eb3>
- Randhawa, S. (2019). The limits of pious families: Religion, family and the state in the women's pages of Utusan Malaysia (1987–98). *International Journal of Media and Cultural Politics*, 15(2), 231–238. https://doi.org/10.1386/macp.15.2.231_7
- Ranjan Sethi, S., & Mahadik, D. (2024). Exploring the Interrelation: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review of the Current Landscape and Future Trajectories of Fintech and Sustainability. *Central European Business Review*, 13(5). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18267/j.cebr.368>
- Samuri, M. A. A., & Quraishi, M. (2014). Negotiating Apostasy: Applying to “Leave Islam” in Malaysia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 25(4), 507–523. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.907054>
- Senay, B., Millie, J., Wang, L. C., & Nasrudin, R. (2025). Islamic bureaucracies in Indonesia and Turkey: the challenge of comparison. *Religion, State and Society*, 53(3), 165–187. <https://doi.org/10.1080/09637494.2025.2561361>
- Sloane-White, P. (2018). Company rules: Sharia and its transgressions in the Malay-Muslim corporate workplace. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(1), 89–116. <https://doi.org/10.1177/186810341803700104>
- Steiner, K. (2018). Branding Islam: Islam, Law, and Bureaucracies in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/186810341803700102>
- Sullivan, J. R. (2019). Controlling Message and Messenger: Singapore's Ongoing Efforts to Bureaucratize Islam. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(4), 513–521. <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1688516>
- Ting, H. M. H., & Kolawole, T. A. (2024). COMPARATIVE STUDY OF THE ISLAMISATION PROCESS IN MALAYSIA AND NIGERIA: A SOCIAL MOVEMENT THEORY APPROACH. *Journal of International Studies (Malaysia)*, 20(1), 149–176. <https://doi.org/10.32890/jis2024.20.1.6>
- Ufen, A. (2009). Mobilising political Islam: Indonesia and Malaysia compared. *Commonwealth and Comparative Politics*, 47(3), 308–333. <https://doi.org/10.1080/14662040903073761>
- Wadipalapa, R. (2021). Countering the Communist Imaginary: The Role of Nahdlatul Ulama in Indonesia's 2014 and 2019 Presidential Elections. *Contemporary Southeast Asia*, 43(3), 557–584. <https://doi.org/10.1355/cs43-3e>